



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Selasa, 22 Juli 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Bupati Tanggapi Tuntutan Mahasiswa

KOTA-Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemkab Sidoarjo, Senin (21/7).

Dalam aksinya, mereka menyuarakan tuntutan terkait pelayanan publik yang dinilai belum maksimal, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, penerangan umum, hingga program layanan kesehatan gratis.

Presiden BEM Unusida, Muhammad Burhanuddin, menyoroti kondisi jalan rusak yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

● Ke Halaman 10



LESEHAN: Bupati Sidoarjo Subandi saat audiensi dengan kelompok mahasiswa Unusida di halaman kantor Pemkab Sidoarjo.



AUDIENSI: Puluhan mahasiswa Unusida menyampaikan tuntutan ke Bupati Sidoarjo Subandi dan sejumlah kepala OPD di Kantor Pemkab Sidoarjo kemarin (21/7). Mereka ingin frontage road segera selesai, pengobatan gratis, dan jalan mulus.

Mahasiswa Desak Pemkab Tuntaskan Frontage Road

SIDOARJO - Puluhan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) menggelar aksi di depan kantor Pemkab Sidoarjo kemarin (21/7). Mereka menuntut perbaikan pelayanan publik, percepatan pembangunan jalan frontage road, penerangan jalan umum, hingga program kesehatan gratis.

Presiden BEM Unusida Muhammad Burhanuddin mengatakan, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan dasar seperti kondisi jalan rusak di beberapa titik. Mahasiswa juga mendesak agar proyek frontage road Waru-Buduran segera diselesaikan. "Karena men-

jadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di kawasan perkotaan," kata Burhan.

Bupati Sidoarjo Subandi mengaku pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari kalangan akademik. Subandi memastikan proyek frontage road Waru-Buduran berjalan sesuai jadwal. Dia menyebut proses pembebasan lahan akan dituntaskan tahun ini dan konstruksi fisik ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2026. "Kami berkomitmen menuntaskan proyek ini karena menyangkut mobilitas masyarakat dan pengurai kemacetan," tuturnya. (eza/uzi)

Bupati Tanggapi Tuntutan...

"Kerusakan parah terdapat di sejumlah titik, seperti ruas PU Lingkar Timur dan Simpang Empat Gedangan. Ini membahayakan dan rawan kecelakaan," ujarnya.

Mahasiswa juga mendesak percepatan penyelesaian proyek frontage road Waru-Buduran, yang dinilai penting untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan. Selain itu, mereka meminta pengawasan bersama terhadap program berobat gratis agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

"Kami mendorong agar mahasiswa dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, supaya transparansi dan efektivitas program bisa terjamin," tambah Burhanuddin.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan daerah. Ia menganggap aksi tersebut sebagai bentuk kontribusi positif.

"Kami sudah berdialog langsung dan menjawab semua pertanyaan mahasiswa. Kami senang karena mahasiswa Unusida ingin ikut mengawasi ke-

bijakan pemerintah," ucap Subandi. Ia menyatakan, perbaikan penerangan jalan umum (PJU) menjadi salah satu prioritas. Pemerintah menargetkan seluruh PJU yang mati akan diperbaiki paling lambat pada September 2025.

Sementara untuk proyek frontage road Waru-Buduran, Subandi menyebut proses pembebasan lahan akan dirampungkan pada tahun ini, sedangkan pengerjaan fisik ditargetkan selesai pada 2026. "Kami berkomitmen untuk menuntaskan proyek ini demi kelancaran mobilitas masyarakat," pungkasnya. (sai/vga)

Pengembang Jual Beli Tanah Kavling Tak Pernah Tunjukkan Izin ke Desa

Pengurusan Lahan Sempat Dihentikan

SIDOARJO - Aktivitas proyek kavling Mutiara Alas Tipis di Dusun Alas Tipis diduga tak berizin. Hingga kini, pengembang PT Makmur Tenram Berprestasi (MTB) belum menyerahkan legalitas dan izin ke pihak desa.

Sekretaris Desa Pabean, Yasinta mengatakan, pengembang mulai masuk sejak 2021. Sejak awal masuk ke wilayah desa, PT MTB tak pernah menunjukkan legalitas kepemilikan tanah secara lengkap. Sehingga saat proses pengurusan, bermasalah.

Salah satunya karena pengembang belum bisa menunjukkan dokumen legalitas atas tanah yang digarap. "Kepala desa kami saat itu sempat menegur pihak pelaksana agar alat berat



Sampai sekarang, yang bersangkutan belum bisa menunjukkan bukti sah. Warga pun terus mengadu ke kami."

YASINTA
Sekdes Pabean

tidak beroperasi sebelum ada bukti legalitas diserahkan ke desa," ungkapnya.

Menurutnya, Perdes Pabean memiliki perdes yang mengatur soal aktivitas pengurusan dan pematangan lahan. Salah satunya pengembang harus menunjukkan bukti hak milik serta izin dari dinas terkait, seperti Perkim

CKTR dan DPUBMSDA. "Sampai sekarang, yang bersangkutan belum bisa menunjukkan bukti sah. Warga pun terus mengadu," ujarnya. Perdes sempat beberapa kali memanggil pihak pengembang. Akan tetapi, pimpinan atau pemilik perusahaan tak pernah hadir. Hanya perwakilan legal atau kepala lapangan yang datang. "Kami ingin klarifikasi langsung ke pemilik," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT MTB mengatakan pihaknya sudah mengajukan izin lewat badan legalnya. Mengenal IJB palsu, Yuda mengatakan, legal notarisnya yang melakukan. "Legal dari notaris kami ada wawar prestasi dan kami berhentikan, termasuk karena yang bersangkutan melakukan pemalsuan IJB sebagian user," ujarnya. (eza/uzi)



Ketua Umum KONI Sidoarjo, Imam Mukri, didampingi Wakil Ketua KONI, Setiyo Hartono, saat kegiatan evaluasi tim pemenang Sidoarjo.

KONI Sidoarjo Kumpulkan Tim Pemenangan Porprov Jatim Sidoarjo, Bhirawa

Tim Monev yang merupakan tim pemenang cabang olah raga kontingen Sidoarjo, dikumpulkan oleh KONI Sidoarjo dengan segera, Sabtu (19/7) akhir pekan lalu. Tujuannya, untuk mengevaluasi kecurangan saat Porprov Jatim IX 2025 di Malang raya, supaya bisa berprestasi pada Porprov X tahun 2027 di Kota Surabaya.

"Saya sangat mendukung gerak cepat dari KONI Sidoarjo ini, kita harus berbenah dan membuat keputusan yang terbaik," komentar Sariyadi, Sabtu (19/7) akhir pekan lalu, tim Monev dari Cabor Atletik, tenis lapangan dan pencak silat.

Menurut Sariyadi, Porprov tahun 2027 mendatang di Kota Surabaya, ia anggap sebagai tempat yang netral. Bila di Malang raya-Kabupaten Sidoarjo berada di peringkat ke-3, di bawah tuan rumah Kota Malang, maka pada saat Porprov 2027 mendatang di Kota Surabaya sebagai tempat yang netral, kontingen Kabupaten Sidoarjo harus menjadi lebih baik.

Pendapat Sariyadi juga didukung oleh anggota Tim Monev lainnya, Rudi Kurniawan, yang saat Porprov Jatim IX 2025, melakukan Monev pada Cabor Akuatik dan Cabor Dayung.

Pada Cabor akuatik nomor renang kolam kontingen Sidoarjo memperoleh 2 medali emas dan akuatik pada nomor OWS memperoleh 1 medali emas. [kus.wwn]

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo

Bupati Tanggapi Tuntutan Mahasiswa

KOTA-Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemkab Sidoarjo, Senin (21/7).

Dalam aksinya, mereka menyuarakan tuntutan terkait pelayanan publik yang dinilai belum maksimal, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, penerangan umum, hingga program layanan kesehatan gratis.

Presiden BEM Unusida, Muhammad Burhanuddin, menyoroti kondisi jalan rusak yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

● Ke Halaman 10



M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

LESEHAN: Bupati Sidoarjo Subandi saat audiensi dengan kelompok mahasiswa Unusida di halaman kantor Pemkab Sidoarjo.



Bupati Tanggapi Tuntutan...

“Kerusakan parah terdapat di sejumlah titik, seperti ruas PU Lingkar Timur dan Simpang Empat Gedangan. Ini membahayakan dan rawan kecelakaan,” ujarnya.

Mahasiswa juga mendesak percepatan penyelesaian proyek frontage road Waru-Buduran, yang dinilai penting untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan. Selain itu, mereka meminta pengawasan bersama terhadap program berobat gratis agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

“Kami mendorong agar mahasiswa dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, supaya transparansi dan efektivitas program bisa terjamin,” tambah Burhanuddin.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan daerah. Ia menganggap aksi tersebut sebagai bentuk kontribusi positif.

“Kami sudah berdialog langsung dan menjawab semua pertanyaan mahasiswa. Kami senang karena mahasiswa Unusida ingin ikut mengawasi ke-

bijakan pemerintah,” ucap Subandi.

Ia menyatakan, perbaikan penerangan jalan umum (PJU) menjadi salah satu prioritas. Pemerintah menargetkan seluruh PJU yang mati akan diperbaiki paling lambat pada September 2025.

Sementara untuk proyek frontage road Waru-Buduran, Subandi menyebut proses pembebasan lahan akan dirampungkan pada tahun ini, sedangkan pengerjaan fisik ditargetkan selesai pada 2026. “Kami berkomitmen untuk menuntaskan proyek ini demi kelancaran mobilitas masyarakat,” pungkasnya. (sai/vga)



BANGKU POJOK



alikusyanto/bhirawa

Ketua Umum KONI Sidoarjo, Imam Mukri, didampingi Wakil Ketua KONI, Setiyo Hartoto, saat kegiatan evaluasi tim pemenang Sidoarjo.

KONI Sidoarjo Kumpulkan Tim Pemenangan Porprov Jatim

Sidoarjo, Bhirawa

Tim Monev yang merupakan tim pemenang cabang olah raga kontingen Sidoarjo, dikumpulkan oleh KONI Sidoarjo dengan segera, Sabtu (19/7) akhir pekan lalu. Tujuannya, untuk mengevaluasi kekurangan saat Porprov Jatim IX 2025 di Malang raya, supaya bisa berprestasi pada Porprov X tahun 2027 di Kota Surabaya.

"Saya sangat mendukung gerak cepat dari KONI Sidoarjo ini, kita harus berbenah dan membuat keputusan yang terbaik," komentar Sariyadi, Sabtu (19/7) akhir pekan lalu, tim Monev dari Cabor Atletik, tenis lapangan dan pencak silat.

Menurut Sariyadi, Porprov tahun 2027 mendatang di Kota Surabaya, ia anggap sebagai tempat yang netral. Bila di Malang raya Kabupaten Sidoarjo berada di peringkat ke-3, di bawah tuan rumah Kota Malang, maka pada saat Porprov 2027 mendatang di Kota Surabaya sebagai tempat yang netral, kontingen Kabupaten Sidoarjo harus menjadi lebih baik.

Pendapat Sariyadi juga didukung oleh anggota Tim Monev lainnya, Rudi Kurniawan, yang saat Porprov Jatim IX 2025, melakukan Monev pada Cabor Akuatik dan Cabor Dayung.

Pada Cabor akuatik nomor renang kolam kontingen Sidoarjo memperoleh 2 medali emas dan akuatik pada nomor OWS memperoleh 1 medali emas. [kus.wwn]

Buaya 4 Meter Muncul di Kali Kepetingan

SIDOARJO, SURYA - Buaya dengan panjang sekira empat meter muncul di daratan Sidoarjo. Tepatnya di pinggir Kali Kepetingan, Desa Sawahan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo.

Sejumlah warga sempat memotret dan merekam video kemunculan buaya tersebut. Gambar buaya besar itupun viral setelah tayang di sejumlah media sosial. Warga juga khawatir karena lokasi itu tak jauh dengan perkampungan masyarakat.

Terakhir buaya itu muncul pada Kamis (17/7) lalu. Beberapa warga melihat langsung dan merekam kemunculannya. Mereka kaget karena biasanya buaya muncul di sungai dan hanya melintas begitu saja.

"Sementara kali ini muncul di daratan. Di pinggir sungai, yang lokasinya tidak jauh dari permukiman warga," ujar Sarif, warga yang sempat melihat munculnya buaya tersebut.

Dia dan warga lain menduga, munculnya buaya itu karena mereka lapar dan butuh makan. Atau karena kondisi perubahan cuaca beberapa waktu belakangan.

Namun warga juga tetap beraktivitas seperti biasa. Sehari-hari mereka tetap menggunakan perahu kecil



SURYA/IST

BUAYA DARAT - Buaya dengan panjang sekira empat meter saat muncul di daratan, pinggir Kali Kepetingan, Desa Sawahan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo beberapa waktu lalu.

melintasi sungai itu. Untuk keluar atau masuk ke daerah terpencil di kawasan Sawahan tersebut memang cuma dua jalur. Lewat sungai atau jalan kecil di antara tambak - tambak.

"Khawatir sih, tapi mau bagaimana lagi wong ini jalurnya. Sehari-hari melintas ya juga lewat sungai ini," lanjutnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Bahrul Amig, menyebut munculnya buaya itu tidak ada kaitannya dengan kondisi lingkungan dan sebagainya. Setidaknya, sejauh ini belum ditemukan faktor tersebut.

"Sepertinya hanya rutinitas atau habitat saja. Kerap kali muncul buaya di sekitaran

kawasan itu, semacam aktivitas tahunan. Sama halnya dengan yang beberapa kali terlihat di kawasan Kali Porong," ungkap Bahrul Amig.

Dia juga memastikan tidak ada faktor migrasi atau sebagainya. Biota sungai masih normal seperti biasa. Dan potensi daruratnya juga belum terlihat sampai sekarang. Buaya hanya muncul begitu saja, tidak lebih.

"Kondisinya masih aman. Tidak ada apa-apa. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi di daerah situ kan memang terkenal dari dulu banyak buayanya. Dan setahu kami, tidak pernah sampai ke permukiman penduduk atau menyerang warga," katanya. (ufi)

Fakultas Kedokteran Unair Sosialisasikan Buku Kesehatan Lansia di Puskesmas Waru

WARU-Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) menggelar kegiatan sosialisasi pengisian buku Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) di Puskesmas Waru, Senin (21/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang rutin dilakukan setiap tahun oleh institusi tersebut.

Dosen FK Unair, Dr. Lilik Djuari, dr., M.Kes., menjelaskan bahwa pengabdian masyarakat merupakan bagian dari triharma perguruan tinggi. Tahun ini, fokus kegiatan diarahkan pada pemberdayaan kader kesehatan dalam penggunaan dan pengisian buku Kesehatan Lansia.

"Buku ini sangat bermanfaat untuk mencatat kondisi kesehatan lansia secara menyeluruh, termasuk aspek psikologis dan sosial. Formatnya juga sederhana dan mudah digunakan," ujar Dr. Lilik saat ditemui Radar Sidoarjo.

Buku Kesehatan Lansia memuat berbagai informasi



BERMANFAAT: Dosen FK Unair, Dr. Lilik Djuari, dr., M.Kes. saat mensosialisasikan buku Kesehatan Lansia kepada kader kesehatan di Puskesmas Waru.

penting seperti identitas lansia, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik dan laboratorium, deteksi dini masalah kejiwaan, demensia, serta risiko jatuh. Selain itu, buku ini juga mencatat status imunisasi, gizi, akti-

vitas fisik, hingga tingkat kemandirian.

Kegiatan sosialisasi tahun ini dipusatkan di Puskesmas Waru karena wilayah ini memiliki populasi lansia yang cukup tinggi dan dukungan aktif dari ka-

der kesehatan.

"Saya sudah pernah memberikan penyuluhan di sini sebelumnya. Kadernya sangat aktif dan responsif, sehingga sangat cocok untuk kegiatan ini," tambahnya.



SINERGI: Dosen FK Unair, Dr. Lilik Djuari, dr., M.Kes (tengah) foto bersama peserta sosialisasi pengisian buku Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) di Puskesmas Waru.

Dr. Lilik menekankan bahwa buku Kesehatan Lansia dapat berfungsi sebagai rekam medis pribadi yang membantu deteksi dini dan intervensi cepat, baik oleh tenaga kesehatan maupun anggota keluarga.

"Buku ini juga bisa menjadi panduan keluarga dalam merawat dan mendampingi lansia agar tetap sehat, mandiri, bahagia, dan produktif," jelasnya.

Setelah sosialisasi, kegiatan akan dilanjutkan

dengan praktik lapangan di Posyandu Keluarga Desa Brebek. Para kader akan langsung menerapkan pengetahuan yang telah didapat dengan mendampingi para lansia.

● Ke Halaman 10

Fakultas Kedokteran Unair...

"Harapan saya, materi yang kami sampaikan tidak berhenti di sini, tapi benar-

benar bisa diterapkan oleh kader dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia di Kecamatan Waru," pungkas Dr. Lilik. (sai/vga)

Empat Ruas Jalan Tambahan Masuk Lelang Betonisasi Jalan

WARU-Pemerintah Kabupaten (Pemb) Sidoarjo terus mempercepat program peningkatan infrastruktur jalan. Empat ruas tambahan resmi masuk tahap lelang proyek betonisasi dan peningkatan jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, mengatakan bahwa tiga ruas jalan yang berada di wilayah Waru akan dibeton, yaitu: Jalan Brigjen Katamso (Kedungrejo-Wadungasri), Jalan Wadungasri-Tambaksawah, dan Jalan Tambakrejo-Tambaksawah.

Sementara satu ruas lainnya berada di Kecamatan Sedati, yakni Jalan Kalanganyar-Segoro Tambak.

"Keempat ruas ini kami tingkatkan demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Panjang masing-masing ruas bervariasi, tergantung kondisi dan kebutuhan di lapangan," ujarnya, Senin (21/7).

Adapun rincian panjang jalan yang



MASUK LELANG: Jalan Brigjen Katamso ruas Kedungrejo hingga Wadungasri akan dilakukan betonisasi oleh Pemkab Sidoarjo.

akan ditingkatkan meliputi: Jalan Brigjen Katamso: 1.600 meter, Jalan Wadungasri-Tambaksawah: 1.400 meter, Jalan Kalanganyar-Segoro

Tambak: 1.000 meter, dan Jalan Tambakrejo-Tambaksawah: 237 meter.

Dwi menjelaskan, ruas-ruas tersebut selama ini banyak dikeluhkan

warga karena rusak parah dan tidak bisa lagi diperbaiki dengan tambal sulam. "Karena itu, kami lakukan peningkatan secara menyeluruh melalui proyek betonisasi," tegasnya.

Dengan tambahan empat ruas ini, total sudah ada sembilan ruas jalan yang masuk proses lelang. Dua ruas lainnya masih dalam tahap persiapan dan ditargetkan segera menyusul.

"Totalnya ada sebelas ruas jalan yang akan dibeton dan ditingkatkan tahun ini. Kami pastikan semua pekerjaan tuntas sesuai jadwal," imbuh Dwi.

Ia menambahkan, proyek ini merupakan bagian dari program prioritas Bupati Sidoarjo untuk pemerataan infrastruktur hingga ke wilayah pinggiran.

"Jika seluruh jalan sudah selesai ditingkatkan, kami harap mobilitas warga semakin lancar dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut," pungkasnya. (sai/vga)

Pengembang Jual Beli Tanah Kavling Tak Pernah Tunjukkan Izin ke Desa

Pengurusan Lahan Sempat Dihentikan

SIDOARJO - Aktivitas proyek kavling Mutiara Alas Tipis di Dusun Alas Tipis diduga tak berizin. Hingga kini, pengembang, PT Makmur Tenram Berprestasi (MTB) belum menyetorkan legalitas dan izin ke pihak desa.

Sekretaris Desa Pabean, Yasinta mengatakan, pengembang mulai masuk sejak 2021. Sejak awal masuk ke wilayah desa, PT MTB tak pernah menunjukkan legalitas kepemilikan tanah secara lengkap. Sehingga saat proses pengurusan, bermasalah.

Salah satunya karena pengembang belum bisa menunjukkan dokumen legalitas atas tanah yang digarap. "Kepala desa kami saat itu sempat menegur pihak pelaksana agar alat berat



Sampai sekarang, yang bersangkutan belum bisa menunjukkan bukti sah. Warga pun terus mengadu ke kami."

YASINTA
Sekdes Pabean

tidak beroperasi sebelum ada bukti legalitas diserahkan ke desa," ungkapnya.

Menurutnya, Pemdes Pabean memiliki perdes yang mengatur soal aktivitas pengurusan dan pematangan lahan. Salah satunya pengembang harus menunjukkan bukti hak milik serta izin dari dinas terkait, seperti Perkim

CKTR dan DPUBMSDA.

"Sampai sekarang, yang bersangkutan belum bisa menunjukkan bukti sah. Warga pun terus mengadu," ujarnya. Pemdes sempat beberapa kali memanggil pihak pengembang. Akan tetapi, pimpinan atau pemilik perusahaan tak pernah hadir.

Hanya perwakilan legal atau kepala lapangan yang datang. "Kami ingin klarifikasi langsung ke pemilik," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT MTB mengatakan pihaknya sudah mengajukan izin lewat bagian legalnya. Mengenai IJB palsu, Yuda mengatakan, legal notarisnya yang melakukan. "Legal dari notaris kami ada wan prestasi dan kami berhenti, termasuk karena yang bersangkutan melakukan pemalsuan IJB sebagian user," ujarnya. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Empat Ruas Sepanjang 4.237 Meter Masuk Lelang Proyek Betonisasi

SIDOARJO - Ada tambahan empat ruas lagi yang resmi masuk tahap lelang untuk proyek betonisasi. Tiga ruas berada di wilayah Kecamatan Waru dan satu di Sedati.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono menjelaskan, tiga ruas di Waru yang masuk lelang yaitu Ruas Kedungrejo-Wadungasri di Jalan Brigjen Katamso), ruas Wadungasri-Tambak Sawah, serta ruas Tambakrejo-Tambaksawah. "Di Sedati, ruas Kalanganyar-Segoro Tambak akan dibeton," katanya kemarin (21/7).

Keempatnya akan dibeton dan ditingkatkan dengan panjang bervariasi. Jalan Brigjen Katamso sepanjang 1.600 meter, Kalanganyar-Segoro Tambak sepanjang 1.000 meter, ruas Wadungasri-Tambaksawah sepanjang 1.400 meter. Sedangkan ruas Tambakrejo-Tambaksawah, memiliki panjang sekitar 237 meter.

"Sejumlah ruas tersebut yang selama ini menjadi keluhan warga karena kondisi rusak dan tidak cukup jika hanya tambal sulam," katanya. Dengan tambahan empat ruas tersebut, total sudah ada sembilan ruas yang masuk proses lelang tahun ini. "Tinggal dua ruas lagi yang belum masuk lelang. Tapi kami pastikan total sebelas ruas bisa tuntas dibeton di tahun ini," tuturnya. (eza/uzi)



ANGGER BONDAN/JAWA POS
SERING RUSAK: Kendaraan melintas di Jalan Tambakrejo, Waru, kemarin (21/7). Jalan sepanjang 237 meter itu segera dibeton.

Jawa Pos



AHMAD REZA/JAWA POS

AUDIENSI: Puluhan mahasiswa Unusida menyampaikan tuntutan ke Bupati Sidoarjo Subandi dan sejumlah kepala OPD di Kantor Pemkab Sidoarjo kemarin (21/7). Mereka ingin frontage road segera selesai, pengobatan gratis, dan jalan mulus.

Mahasiswa Desak Pemkab Tuntaskan Frontage Road

SIDOARJO - Puluhan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) menggelar aksi di depan kantor Pemkab Sidoarjo kemarin (21/7). Mereka menuntut perbaikan pelayanan publik, percepatan pembangunan jalan frontage road, penerangan jalan umum, hingga program kesehatan gratis.

Presiden BEM Unusida Muhammad Burhanuddin mengatakan, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan dasar seperti kondisi jalan rusak di beberapa titik. Mahasiswa juga mendesak agar proyek frontage road Waru-Buduran segera diselesaikan. "Karena men-

jadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di kawasan perkotaan," kata Burhan.

Bupati Sidoarjo Subandi mengaku pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari kalangan akademisi. Subandi memastikan proyek frontage road Waru-Buduran berjalan sesuai jadwal. Dia menyebut proses pembebasan lahan akan dituntaskan tahun ini dan konstruksi fisik ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2026. "Kami berkomitmen menuntaskan proyek ini karena menyangkut mobilitas masyarakat dan pengurai kemacetan," tuturnya. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi A DPRD Sidoarjo Bersama Satpol PP dan Bea Cukai Gencarkan Sosialisasi Penegakan Hukum Rokok Ilegal



SIDOARJO – Dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal yang kian marak dan merugikan negara, Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Sidoarjo menggelar kegiatan sosialisasi penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (08/07/2025) di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari legislatif maupun eksekutif, di antaranya Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Raymond Tara Wahyudi, ST, Anggota Komisi A Muchammad Rafi Wibisono, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Sidoarjo Anas Ali Akbar, serta Pejabat Bea Cukai Ahli Pertama Nevi Ekuandini.





Dalam sambutannya, Kepala Bidang PPUD Satpol PP Sidoarjo, Anas Ali Akbar, menyampaikan pentingnya penegakan hukum yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Menurutnya, penyebaran rokok tanpa pita cukai bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat merugikan penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional.

“Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia melibatkan berbagai upaya preventif dan represif yang bertujuan untuk menekan penyebaran rokok tanpa cukai. Hal ini sangat merugikan negara dan masyarakat,” ujar Anas.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai bentuk edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, disertai operasi pasar serta penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran. Menurut Anas, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Kepabebean.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Raymond Tara Wahyudi menekankan pentingnya dukungan legislatif dalam mendorong pemahaman masyarakat tentang dampak rokok ilegal terhadap stabilitas ekonomi dan hukum negara. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya sosialisasi yang menasar masyarakat tingkat desa.

“Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi terkait pemberantasan rokok ilegal di desa-desa. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk membangun bangsa dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” ucap Raymond.

Ia menambahkan bahwa rokok bukan hanya soal konsumsi atau gaya hidup, melainkan menyangkut aturan hukum serta sumbangsih terhadap perekonomian negara. “Pemerintah menggantungkan sebagian pendapatannya dari cukai rokok legal. Maka keberadaan rokok ilegal jelas sangat merugikan negara,” tegasnya.



Raymond juga mengingatkan bahwa hampir semua lapisan masyarakat telah berkontribusi terhadap pajak, bahkan dalam aktivitas sehari-hari seperti penggunaan kuota internet hingga air minum kemasan. Karena itu, menurutnya, membeli produk legal adalah wujud nyata dukungan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam paparannya, Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Muchammad Rafi Wibisono, menjelaskan bahwa rokok ilegal memiliki berbagai bentuk dan ciri-ciri yang harus diketahui masyarakat. Lima ciri utama rokok ilegal adalah Rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai, Rokok dengan pita cukai palsu, Rokok dengan pita cukai bekas pakai,

Rokok dengan pita cukai salah peruntukan, serta Rokok dengan pita cukai salah personalisasi.

Rokok ilegal sangat merugikan negara karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan cukai. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan negara yang berasal dari sektor cukai," jelas Rafi.

Dalam hal ini Kabupaten Sidoarjo memiliki cukup banyak perusahaan rokok legal yang beroperasi dan menyumbang pendapatan melalui cukai. Keberadaan rokok ilegal tidak hanya merugikan negara tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat di sektor industri tembakau.

Menurut data yang disampaikan Rafi, omzet industri rokok secara nasional mengalami penurunan sebesar 12 persen pada tahun 2024. Salah satu penyebabnya diduga karena semakin maraknya peredaran rokok ilegal di berbagai daerah, termasuk di wilayah Sidoarjo.

"Rokok ilegal memang sering diburu karena harganya lebih murah. Tapi di balik harga murah itu, ada kerugian besar bagi negara dan bahaya bagi masyarakat," kata Rafi.

Rafi juga mengingatkan bahwa sanksi bagi pelaku peredaran rokok ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan ancaman pidana hingga lima tahun penjara dan denda dalam jumlah besar.

Banyak warga tidak menyadari bahwa pita cukai bisa dipalsukan atau digunakan ulang. Padahal, semua itu melanggar hukum dan merugikan negara. Ini bukan perkara kecil, tapi masalah serius," kata Rafi.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Masyarakat harus diberi pemahaman yang utuh. Rokok ilegal itu bukan hanya soal harga murah. Ada aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek moral di dalamnya. Bila kita terus membiarkannya, maka kita membiarkan kerugian negara dan kehancuran industri legal," ujar Rafi di hadapan peserta sosialisasi yang terdiri dari perangkat desa, pelaku usaha mikro, serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Pejabat Bea Cukai Sidoarjo Nevi Ekuandini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan cukai merupakan tindak pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pelaku yang mengedarkan rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana dan denda yang berat.

"Rokok ilegal tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga bisa dijerat secara pidana. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat agar tidak membeli maupun mengedarkan rokok ilegal," ungkap Nevi.

Ia juga mengimbau para pedagang dan pelaku usaha untuk lebih selektif dalam memilih produk yang dijual agar tidak terjerat hukum. Bea Cukai Sidoarjo juga terus meningkatkan patroli dan pengawasan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD.

Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, hingga para pelaku usaha, dapat lebih memahami bahaya rokok ilegal dan ikut aktif dalam pengawasannya.

Kolaborasi lintas sektor antara legislatif, eksekutif, dan aparat penegak hukum dianggap sebagai langkah penting untuk mewujudkan daerah yang bersih dari peredaran rokok ilegal.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sumpek Bupati Dan Dewan Tidak Harmonis, Puluhan Kades Datangi Gedung DPRD

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- puluhan kepala desa dari berbagai kecamatan se Sidoarjo, Senin (21/7/2025), melakukan kunjungan mendadak ke kantor DPRD Sidoarjo, menemui pimpinan dewan.



Kedatangan para Kades ini, sebagai bentuk prihatin mereka atas ketidak harmonisan bupati dengan dewan.

Afif Kades Plumbungan Sukodono mengawali diskusi dengan Warih Andono SH dan Suyarno SH dua pimpinan dewan yang menerima para kades, menyampaikan kegelisahan atau tepatnya ketakutan, atas kondisi gonjang ganjing di Sidoarjo antara Bupati Sidoarjo dengan legislatif.

Karena menurutnya, kondisi tidak akur dua lembaga ini, bisa imbasnya ke desa dan terancam tidak bisa melakukan pembangunan.

"Sehingga kedatangan kami disini, untuk mendapatkan informasi yang benar terkait kondisi bupati dengan dewan," jelas

Hal senada disampaikan Slamet Bashori Kepala desa Wangkal Kecamatan Krembung, yang berharap menginginkan secepatnya gonjang ganjing antara Bupati dan anggota dewan selesai.

Mendapatkan berbagai keluhan ini, Warih Andono wakil ketua DPRD Sidoarjo dari Fraksi Golkar, menyatakan bahwa hubungan DPRD dan Bupati Sidoarjo tidak ada masalah.

Namun untuk dinamika politik, memang ada ketidak selarasan yang menyebabkan penolakan LKPJ 2024.

"Yang terjadi adalah penolakan LKPJ 2024, tetapi tidak mempengaruhi proses pemerintahan apapun.

Tidak ada pengaruh apapun pada anggaran desa yang sudah dibuat sebelumnya oleh bapak bapak kepala desa," ujar Warih.

Warih berharap, para kepala desa diharapkan tidak menyimpulkan kabar dengan negatif, karena dinamika di Sidoarjo masih dinamis.

"Saat ini yang sedang dibahas adalah tafsir PAK yang masih belum sepatkat," ungkap Warih Andono.

Dalam kesempatan ini, ada kepala desa berharap untuk pelaksanaan Pilkades 2026 tetap bisa berjalan, dan tidak ditunda karena alasan apapun.

Selain itu, para kades juga meminta agar tali asih untuk kepala desa, tetap diberikan dengan semestinya di tahun 2026 nanti. (Abidin)

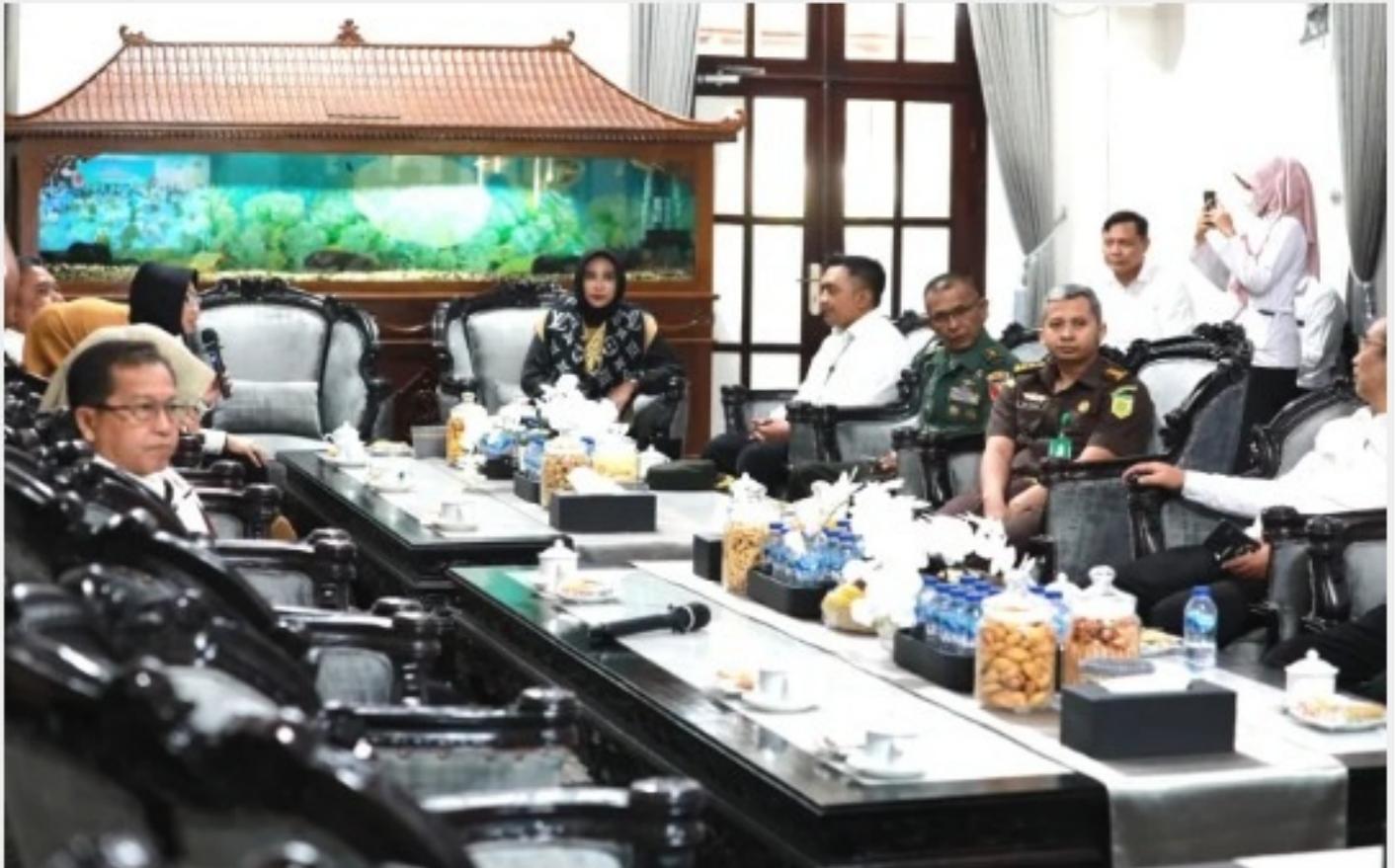




INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hindari Pinjol Wabup Sidoarjo Ajak Masyarakat Dukung Koperasi



Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Hindari pinjol Wabup Sidoarjo ajak masyarakat dukung koperasi. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sidoarjo mendukung keberadaan koperasi, serta menumbuhkan semangat ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Di Kabupaten Sidoarjo sudah terbentuk 346 KDKMP. Artinya sudah menyeluruh, sehingga diharapkan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Koperasi ini harus menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi warga, kebutuhan rumah tangga warga, bahkan diharapkan mampu menghapuskan pinjaman online (pinjol) dan rentenir” ujar Mimik saat menghadiri acara zoom meeting peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden RI secara serentak, Senin (21/7/2025).

Hindari pinjol Wabup Sidoarjo ajak masyarakat dukung koperasi. Mimik menambahkan, setelah resmi dibentuk KDKMP ini, pemerintah wajib melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin, agar tujuan koperasi yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan ekonomi dapat tercapai.

"Setelah dibentuk, mari bersama sama rutin melakukan evaluasi dan monitoring dengan turun kebawah agar tau kebutuhan dan kesulitan apa yang dihadapi," tambahnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati mengingatkan agar seluruh pengurus koperasi senantiasa mematuhi Undang-undang Perkoperasian serta membuat laporan secara berkala untuk keberlangsungan KDKMP.

"Saya minta kepada pengurus koperasi agar melaporkan keuangannya secara berkala, untuk keberlangsungan koperasi masing-masing. Sebab, koperasi ini diharapkan menjadi ujung tombak perekonomian desa/kelurahan lebih mandiri," tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Edi Kurniadi, mengatakan saat ini KDKMP ini sudah mendapatkan fasilitas NPWP dan Tabungan BRI tanpa setoran awal. Kedepan, Dinkopum akan memfasilitasi nomor induk berusaha (NIB) dan pelatihan untuk pengurus dan pengawas KDKMP.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pengurus dan pengawas, nantinya kami akan fasilitasi NIB dan pelatihan, serta kami sudah berkoordinasi dengan Delta Artha untuk dukungan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) agar iklim UMKM di Sidoarjo tumbuh,"ucapnya.

Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) Sidoarjo, Sudono, mengatakan bahwa bank BRI mendukung penuh program KDKMP, melalui AgenBRILink yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. pada layanan tersebut, KDKMP dapat menjalankan berbagai transaksi keuangan, seperti setor dan tarik tunai, top-up, pembayaran tagihan, hingga cicilan.

"Selain itu, dukungan kami diantaranya adanya fasilitas KUR mulai dari Rp 100 juta (untuk pelaku mikro) hingga 500 juta (untuk ritel) tanpa agunan".





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Satpol PP Sidoarjo Gencar Patroli Premanisme, Wujudkan Wilayah Aman dan Kondusif



Kasie Operasional dan Pengendalian Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Koesno Adi Putro

Jawapes, SIDOARJO - Dalam rangka menertibkan adanya premanisme atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meresahkan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sidoarjo bekerjasama dengan Polri dan TNI merazia wilayah rawan di Kabupaten Sidoarjo.

Kasie Operasional dan Pengendalian Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Koesno Adi Putro menyampaikan bahwa gelar Operasi Gabung Tibumtranmas demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. "Fokusnya adalah penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan premanisme anak jalanan," katanya kepada media Jawapes.or.id, Senin (21/7/2025).

Lebih lanjut Novianto mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan persuasif dan mengedepankan humanis terhadap pelanggar PMKS. "Yang terjaring penertiban sejumlah ±31 orang dan saat ini dititipkan di Liponsos Sidoarjo," ujarnya.

Saat patroli di wilayah Porong itu ada pengamen yang tidak diberi uang tapi malah mencoret mobil dan indikasinya dia membawa sajam. Oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi antara Satpol PP, Polri dan TNI, akan secepatnya menindaklanjuti lantaran sudah mengarah ke kriminal, terangnya.

"Selanjutnya, para PMKS dan pengamen jalanan sedang dilakukan pendataan. Namun jika mereka sudah sering melakukan pemaksaan terhadap masyarakat, seperti meminta uang, jika tidak diberi, mereka akan memaksa dengan Sajam, maka akan kita serahkan ke pihak Kepolisian," tegasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Warga Sambungrejo Keluhkan Kondisi Sungai Yang Dipenuhi Eceng Gondok dan Sampah, Minta Pemerintah Segera Bertindak



MEDIASOROTMATA.COM

Tumpukan Eceng Gondok di Jembatan Sungai Mangetan Kanal Yang Menghubungkan Dusun Besok dan Dusun Semambung Desa Sambungrejo

SIDOARJO, **SOROTMATA.COM** | Kondisi memprihatinkan terlihat di salah satu Jembatan aliran sungai Mangetan Kanal yang menghubungkan Dusun Besok dan Dusun Semambung, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Sungai yang seharusnya menjadi saluran irigasi dan pembuangan air bagi warga ini kini dipenuhi oleh eceng gondok dan tumpukan sampah rumah tangga. Keadaan tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan kekhawatiran akan dampak kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Dari pantauan di lapangan pada hari Minggu (20/7/2025), air sungai tampak tertutup oleh hamparan eceng gondok yang tumbuh liar dan tidak terkendali. Di sela-sela tanaman tersebut, tampak puluhan kantong plastik berisi sampah rumah tangga, seperti limbah makanan, plastik, hingga popok sekali pakai.

Sampah-sampah itu diduga berasal dari kebiasaan buruk sebagian warga yang masih membuang sampah ke sungai.

Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran mereka terkait kondisi ini. "Awalnya hanya eceng gondok saja, tapi lama-lama jadi tempat buang sampah.



Busuk busuk dari tumpukan sampah semakin terasa saat pagi dan sore hari. Hal itu mengganggu kenyamanan warga sekitar, terutama anak-anak yang bermain di sekitar sungai dan para lansia yang tinggal dekat lokasi,' ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh warga lain yang Engan mau disebut namanya, yang rumahnya berada tidak jauh dari bibir sungai. Ia mengaku khawatir dengan potensi munculnya penyakit akibat pencemaran tersebut, terutama di musim penghujan yang bisa memperparah penyebaran wabah.

"Yang di kwatirkan kalau air sudah tercampur sampah dan kotoran, nanti anak-anak bisa kena penyakit kulit atau diare. Kami minta tolong supaya pemerintah daerah atau dinas lingkungan hidup segera turun tangan," ucapnya, Minggu.

Masyarakat berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah, mulai dari pembersihan sungai, pemberantasan eceng gondok, penyediaan tempat pembuangan sementara (TPS), hingga edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

"Namun warga berharap perhatian segera diberikan sebelum masalah ini berkembang menjadi bencana lingkungan yang lebih besar," pungkasnya.
(Gis/Nuri)

